



PERAN LITERASI POLITIK BAGI GENERASI MUDA DI ERA DIGITAL

Octa Savanaa Rachmadini^{1*}, Mulawarman², Ratu Indra Kasih Pratiwi³, Nurul Sholeha⁴, Andris Riesfandhy⁵

¹Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Indonesia

²Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Andi Sudirman, Indonesia

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

⁴Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum dan Politik, Universitas Andi Sudirman, Indonesia

⁵Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum dan Politik, Universitas Andi Sudirman, Indonesia

Email Korespondensi: octasavanarac@gmail.com

Abstrak:

Studi ini bertujuan memetakan karakteristik konsumsi informasi digital generasi muda, mengevaluasi tingkat literasi kebijakan publik, mengkaji dampak jangka panjang pemahaman regulasi yang dangkal terhadap prospek sosio-ekonomi pemuda, serta merumuskan formula komunikasi edukasi kebijakan yang taktis. Pendekatan yang diterapkan yaitu kualitatif melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pengumpulan data sekunder dari pangkalan data akademik terbuka yang dibedah menggunakan teknik deskriptif-analitis melalui proses komparasi dan interpretasi riset terdahulu. Temuan riset membuktikan keterikatan gawai yang sangat tinggi (93,02%) justru memicu kemerosotan literasi kewargaan (*civic illiteracy*) akibat sistem algoritma media sosial visual yang menggeser fokus pemuda ke tren hiburan permukaan, menyuburkan disinformasi, dan memperluas gerakan semu (*slacktivism*) sebagai bentuk kepedulian digital yang semu. Dampak riil dari fenomena ini adalah melemahnya posisi tawar para lulusan baru (*fresh graduates*) di dunia kerja akibat ketidakpedulian mereka terhadap instrumen regulasi dasar. Kesimpulannya, aktivitas siber pemuda saat ini melahirkan krisis kognitif dan pengikisan pemahaman hukum yang substantif, sehingga dibutuhkan langkah kolaboratif untuk merombak pola penyebaran informasi melalui saluran komunikasi publik yang interaktif dan inklusif demi melindungi hak-hak strategis masa depan generasi produktif.

Kata Kunci: (Politik, Literasi, Generasi Muda, *Slacktivism*, Komunikasi Publik)

Abstract:

This study aims to map the digital information consumption characteristics of the youth, evaluate their level of public policy literacy, examine the long-term impacts of a superficial understanding of regulations on their socio-economic prospects, and formulate a tactical communication formula for policy education. A qualitative approach was applied through a library research method, utilizing secondary data collected from open academic databases, which were then analyzed descriptively and analytically through the process of comparing and interpreting previous research. The research findings demonstrate that an exceptionally high level of device dependency (93.02%) conversely triggers a decline in civic literacy (civic illiteracy). This is caused by visual social media algorithm systems that shift the youth's focus toward superficial entertainment trends, fuel disinformation, and expand slacktivism as a form of pseudo-digital engagement. The tangible impact of this phenomenon is the weakening bargaining position of fresh graduates in the job market due to their indifference toward fundamental regulatory instruments. In conclusion, the current cyber activities of the youth are creating a cognitive crisis and eroding substantive legal understanding;





therefore, collaborative measures are required to overhaul information dissemination patterns through interactive and inclusive public communication channels to protect the strategic rights of the productive generation's future.

Keywords: *(Politics, Literacy, Youth, Selektivisme, Public Communication)*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital dan penetrasi internet yang masif telah membawa perubahan besar serta transformasi radikal dalam cara masyarakat, terutama generasi muda, berkomunikasi, berinteraksi, dan memperoleh informasi dalam kehidupan sehari-hari (Aulia, 2021). Saat ini, ruang siber telah menjadi domain publik baru yang sangat dominan, di mana sekitar 70% dari seluruh pengguna internet di dunia tercatat aktif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama ekspresi diri (Anwar, 2017). Di Indonesia sendiri, data menunjukkan bahwa pemanfaatan internet dan gawai tidak lagi sekadar menjadi alat bantu fungsional, melainkan telah mendominasi sekaligus mengonstruksi gaya hidup (*lifestyle*) generasi muda secara menyeluruh, yang dibuktikan dengan persentase pemuda pemilik telepon genggam (*handphone*) yang mencapai angka fantastis sebesar 93,02% (Ahmad & Nurhidaya, 2020). Platform-platform media sosial berbasis visual, algoritma interaktif, dan pembaruan seketika seperti Instagram, TikTok, dan YouTube kini telah bertransformasi menjadi bagian tak terpisahkan dari eksistensi identitas generasi muda (Andini dkk., 2025). Medium digital ini menawarkan interaktivitas tanpa batas, kecepatan arus pesan yang luar biasa, serta keberagaman konten multimedia yang sangat sesuai dengan karakteristik, gaya belajar, serta minat generasi digital, hal inilah yang menjadikannya sebagai rujukan utama yang paling sering diakses dan dipercayai oleh anak muda dalam membentuk opini, pandangan sosial, persepsi politik, serta kepribadian mereka di era modern (Indrawan dkk., 2023). Namun, dengan banyaknya penggunaan gawai dan tingginya kelekatan pada media sosial ini melahirkan tantangan budaya baru yang menggeser fokus perhatian anak muda (Kurniati & Wahyuni, 2021). Waktu rata-rata yang dihabiskan seseorang untuk terjun di dunia maya terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana kelompok dewasa muda (18–29 tahun) menempati posisi sebagai kelompok rata-rata pengguna media sosial terbesar, yakni mencapai 90% (Anwar, 2017). Tingginya intensitas ini sayangnya didorong oleh algoritma platform yang menuntut pemuda terus mengikuti tren terbaru demi memuaskan kebutuhan psikologis mereka (Andini dkk., 2025; Anwar, 2017). Akibatnya, perhatian kolektif anak muda setiap harinya habis tersita oleh lingkaran arus informasi yang instan, mengejar popularitas tren digital yang sedang viral, dan pemenuhan gaya hidup hiburan (Ahmad & Nurhidaya, 2020; Anwar, 2017). Pola konsumsi informasi yang didominasi oleh konten superfisial ini menciptakan jarak yang lebar antara generasi muda dengan realitas isu-isu struktural di dunia nyata, termasuk regulasi dan kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah (Andriyendi dkk., 2025).

Masalah utama yang timbul dari fenomena ini adalah timbulnya problematika pendangkalan literasi dan perubahan pola pikir akibat banjirnya informasi (*overloading*) yang tidak terkontrol (Ahmad & Nurhidaya, 2020). Penggunaan media sosial dalam intensitas yang sangat tinggi menyebabkan generasi muda cenderung "menerima" secara mentah-mentah dengan banyaknya informasi yang menyebar di dunia virtual tanpa adanya klarifikasi atau verifikasi kebenaran terlebih dahulu (Ahmad & Nurhidaya, 2020). Kondisi ini diperparah oleh suburnya penyebaran berita bohong (*hoaks*) yang tersebar secara masif dan cepat di dunia virtual (Ahmad & Nurhidaya, 2020; Anwar, 2017). Dampak buruknya langsung menghantam kondisi kognitif pemuda, di mana mereka mengalami kebingungan mendalam untuk membedakan mana informasi kebijakan yang akurat dan valid, serta mana informasi yang bersifat manipulatif atau sekadar propaganda (Andini dkk., 2025). Kebiasaan bermedia sosial yang tidak bijak ini pada akhirnya memicu pergeseran budaya dari yang semula peduli pada lingkungan nyata menjadi budaya digital yang cenderung egois, kurang





memerhatikan lingkungan sekitar, serta abai terhadap aturan formal yang mengikat masa depan mereka (Anwar, 2017).

Ketidakpedulian dan kebutaan terhadap kebijakan publik ini membawa ancaman kerugian nyata bagi masa depan sosio-ekonomi generasi muda itu sendiri. Ketika keputusan dan regulasi penting di sektor pendidikan seperti skema biaya kuliah dan beasiswa serta sektor ketenagakerjaan seperti aturan undang-undang kerja dan upah minimum dirumuskan, suara anak muda kerap absen karena mereka terjebak dalam "ilusi kepedulian" di media sosial. Mereka sering kali mengira bahwa dengan sekadar menyukai (*like*) atau membagikan ulang (*share*) konten yang sedang tren, mereka telah berpartisipasi dalam mengawal masa depan (Andini dkk., 2025). Padahal, tanpa memahami substansi hukum aslinya, para lulusan muda (*fresh graduates*) berisiko kehilangan hak-hak strategis mereka dan berada pada posisi tawar yang lemah di pasar kerja, sehingga rentan terjebak eksploitasi (Andini dkk., 2025). Jika masalah ini dibiarkan, melimpahnya kuantitas digital anak muda tidak akan membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa, melainkan justru melahirkan generasi yang mengalami kelumpuhan literasi kewargaan (*civic literacy*) di tengah derasnya arus teknologi (Ahmad & Nurhidaya, 2020; Andini dkk., 2025).

Pembahasan mengenai bagaimana media digital memengaruhi dan mengalihkan perhatian generasi muda dari isu-isu struktural juga telah banyak dibuktikan oleh peneliti lainnya. Dalam studi yang dilakukan oleh Saud dkk. (2020) yang berjudul "Media Sosial dan Digitalisasi Partisipasi Politik Pada Generasi Muda: Perspektif Indonesia", ditemukan bahwa meskipun media sosial mampu memicu keterlibatan digital secara masif, pola partisipasi yang terbentuk di kalangan anak muda sering kali masih bersifat permukaan. Pola konsumsi informasi yang instan di platform digital cenderung mengarahkan perhatian pemuda pada aspek popularitas dan visual konten, sehingga ruang gerak kritis mereka untuk mendalami teks kebijakan publik yang formal dan mengikat menjadi terabaikan (Saud dkk., 2020).

Fenomena pengalihan fokus akibat algoritma media sosial ini menciptakan tantangan serius berupa "ilusi kepedulian" di ruang siber (Andini dkk., 2025). Banyak anak muda merasa telah memenuhi tanggung jawab kewargaan dan kepeduliannya terhadap masa depan mereka hanya dengan memberikan dukungan digital yang instan, tanpa benar-benar membaca substansi regulasi aslinya secara mendalam (Andini dkk., 2025; Saud dkk., 2020). Kedua penelitian terdahulu ini membuktikan secara nyata bahwa tingginya akses gawai pada generasi digital sama sekali tidak menjamin adanya peningkatan literasi yang kritis, karena ekosistem media sosial saat ini lebih efektif mengemas tren hiburan harian dibandingkan membangun pemahaman kebijakan publik yang mendalam di kalangan pemuda (Andini dkk., 2025; Saud dkk., 2020).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan pola konsumsi informasi digital di kalangan anak muda, sekaligus menganalisis faktor-faktor psikologis maupun teknis algoritma yang menyebabkan terjadinya pergeseran fokus perhatian mereka dari isu-isu struktural ke tren hiburan yang bersifat dasar. Penelitian ini diarahkan untuk mengukur tingkat literasi kebijakan publik secara kritis serta memetakan dampak jangka panjang dari pendangkalan pemahaman regulasi tersebut terhadap masa depan sosio-ekonomi pemuda, terutama dalam menghadapi tantangan di sektor pendidikan dan dunia kerja. Melalui analisis ini, penelitian juga bertujuan untuk mengevaluasi fenomena *slacktivism* atau "ilusi kepedulian" di ruang siber, di mana aktivitas digital instan sering kali disalahartikan oleh generasi muda sebagai bentuk partisipasi kewargaan yang sudah cukup. Pada akhirnya, seluruh rangkaian analisis tersebut ditujukan untuk merumuskan sebuah strategi pengemasan komunikasi edukasi kebijakan publik yang taktis, inklusif, dan interaktif, sehingga mampu bersaing dengan konten hiburan murni serta dapat menjadi rekomendasi yang efektif bagi pemerintah, akademisi, dan konten creator dalam meningkatkan kesadaran kritis generasi muda di ruang digital.





Signifikansi eksplanatoris dan urgensi linier dari penelitian ini bertumpu pada momentum krusial rekonstruksi demografis, di mana stabilitas makroekonomi serta proyeksi pembangunan nasional sangat dideterminasi oleh kapabilitas kognitif dan kesiapan elektoral generasi produktif. Apabila fenomena pengalihan atensi publik akibat disrupsi teknologi digital ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi analitis, maka eskalasi *civic illiteracy* (kebutaan kewargaan) berisiko mendegradasi daya saing pemuda secara masif di era kompetisi global. Ketidakpedulian kolektif terhadap instrumen regulasi pada sektor-sektor fundamental seperti pendidikan tinggi dan tata kelola ketenagakerjaan tidak hanya akan menciptakan kerentanan posisi tawar individu di pasar kerja (labor market *vulnerabilities*), melainkan juga berpotensi mengonversikan dividen bonus demografi menjadi beban sosio-ekonomi yang destruktif bagi negara. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi teoretis dan aplikatif yang sangat mendesak sebagai kerangka rujukan strategis (*strategic framework*) dalam mengevaluasi diseminasi narasi kebijakan publik di ruang siber. Formulasi yang dihasilkan menjadi instrumen esensial bagi institusi birokrasi, akademisi, serta produsen konten untuk segera mentransformasikan model edukasi publik digital agar mampu memitigasi apati struktural dan mengeskalasi kesadaran hukum demi mengamankan hak-hak strategis masa depan generasi muda.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau *literatur review* dengan bersumber dari buku bacaan dan penelitian terdahulu. Pendekatan kualitatif dipilih dengan tujuan untuk memahami fenomena kemampuan literasi politik bagi generasi muda. Penelitian kualitatif dengan studi literatur memungkinkan peneliti memperoleh informasi melalui sumber ilmiah seperti buku dan artikel yang terverifikasi ke validan sumber datanya. Melalui pendekatan ini peneliti dapat memberikan informasi peran literasi politik bagi generasi muda di era digital.

Teknik pengumpulan data

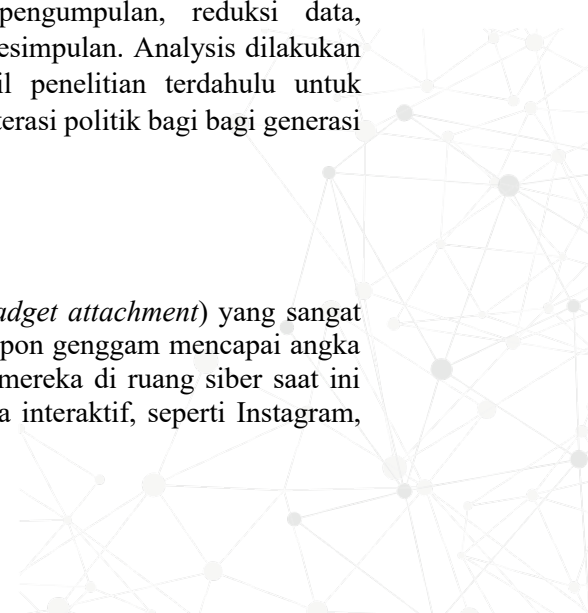
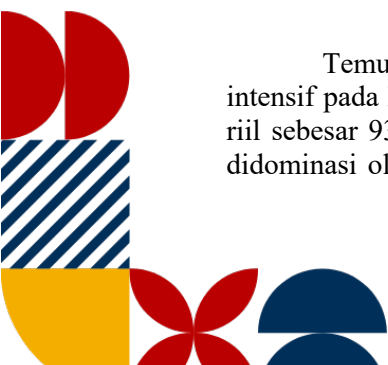
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Data dikumpulkan melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai sumber Pustaka yang relevan dengan penelitian peneliti seperti buku, artikel ilmiah yang terverifikasi sumber datanya. Melalui studi kepustakaan yang dilakukan dari berbagai referensi peneliti memperoleh Gambaran tentang peran literasi politik bagi generasi muda di era digital.

Teknik Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis). Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis melalui proses pengumpulan, reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema, penyajian data serta penarikan Kesimpulan. Analisis dilakukan untuk membandingkan berbagai sumber dan pendapat dari hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik peran literasi politik bagi generasi muda di era digital.

Hasil dan Pembahasan

Temuan lapangan menunjukkan adanya kelekatan gawai (*gadget attachment*) yang sangat intensif pada kelompok pemuda, dengan persentase kepemilikan telepon genggam mencapai angka riil sebesar 93,02% (Ahmad & Nurhidaya, 2020). Aktivitas harian mereka di ruang siber saat ini didominasi oleh platform media sosial berbasis visual dan algoritma interaktif, seperti Instagram,





TikTok, dan YouTube (Andini dkk., 2025). Pola konsumsi informasi yang terbentuk cenderung bersifat instan, nonlinier, dan sangat bergantung pada rekomendasi fitur linimasa platform (Anwar, 2017). Karakteristik utama dari tingginya durasi bermedia sosial ini digerakkan oleh determinan psikologis untuk terus memperbarui tren agar terhindar dari kecemasan sosial atau *Fear of Missing Out* (FoMO) yang memicu adiksi digital (Andini dkk., 2025; Anwar, 2017). Akibatnya, arus pesan yang diserap setiap harinya didominasi oleh konten multimedia hiburan, interaksi kasual, dan kebudayaan populer (Ahmad & Nurhidaya, 2020). Perhatian kolektif kelompok produktif ini secara sistematis telah dialihkan oleh sistem algoritma ke dalam lingkaran tren digital yang superfisial, sehingga menciptakan jarak yang lebar dan memisahkan atensi mereka dari realitas isu-isu struktural serta perkembangan regulasi formal yang dirilis oleh pemerintah di dunia nyata (Andini dkk., 2025).

Data mengenai tingkat pemahaman regulasi mengonfirmasi adanya fenomena devaluasi literasi kewargaan (*civic illiteracy*) yang signifikan di tengah melimpahnya akses internet (Ahmad & Nurhidaya, 2020). Meskipun kecakapan teknis pemuda dalam mengoperasikan gawai berada pada kategori sangat tinggi, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan kemampuan kognitif mereka untuk memverifikasi, menyaring, dan mendalami substansi hukum (Yanto & Sari, 2025). Kelompok pemuda cenderung mengonsumsi ringkasan informasi kebijakan publik yang telah mengalami reduksi makna di media sosial tanpa adanya proses klarifikasi ke dokumen sumber primer (Saud dkk., 2020). Kondisi ini diperparah oleh suburnya penyebaran berita bohong (*hoaks*) yang dikemas secara menarik di dunia virtual (Ahmad & Nurhidaya, 2020; Anwar, 2017). Implikasi nyata dari pendangkalan literasi ini memicu kerentanan posisi tawar individu di pasar kerja (*labor market vulnerabilities*) bagi generasi muda (Andini dkk., 2025). Kelompok lulusan muda (*fresh graduates*) tercatat tidak mengenali instrumen hukum mendasar yang mengikat masa depan mereka, seperti regulasi kontrak kerja dan hak upah minimum, sehingga memperbesar risiko terjebak dalam eksploitasi industri akibat kelumpuhan kesadaran hukum (Andini dkk., 2025).

Hasil observasi terhadap pola keterlibatan sosial dan politik pemuda di ruang digital memperlihatkan meluasnya praktik slacktivism sebagai manifestasi pseudo-kepedulian (Andini dkk., 2025). Bentuk dukungan atau kritik terhadap sebuah kebijakan negara telah mengalami simplifikasi menjadi tindakan-tindakan instan yang minimal usaha, seperti menekan tombol menyukai (*like*), memberikan komentar pendek, atau membagikan ulang (*resharing*) infografis yang sedang viral (Hamran, 2025). Aktivitas digital yang superfisial ini melahirkan "ilusi kepedulian" di mana para pemuda secara psikologis merasa telah menuntaskan kewajiban moral dan tanggung jawab kewargaannya (*civic engagement*) hanya melalui gawai (Andini dkk., 2025). Padahal, keterlibatan semu tersebut tidak dibarengi dengan pemahaman mendalam atau pembacaan terhadap dokumen kebijakan aslinya (Yanto & Sari, 2025). Fenomena ini membuktikan bahwa ekosistem media sosial saat ini lebih efektif memicu respons emosional jangka pendek berbasis tren digital yang dangkal daripada membangun pemahaman kebijakan publik yang kritis, mendalam, dan substantif di kalangan generasi muda (Adityawan dkk., 2025).

Konfirmasi empiris mengenai tingginya kelekatatan gawai yang mencapai angka *real* 93,02% membuktikan bahwa ruang siber telah mengalami pergeseran fungsi fungsional menjadi ruang eksistensial primer bagi generasi muda (Ahmad & Nurhidaya, 2020). Dominasi durasi harian dalam mengakses platform berbasis visual seperti TikTok, Instagram, dan YouTube secara masif menginduksi fenomena dekonstruksi atensi publik (Andini dkk., 2025). Melalui perspektif teoretis, mekanisme algoritma linimasa dirancang untuk mengeksploitasi kerentanan psikologis berupa kecemasan sosial atau *Fear of Missing Out* (FoMO) (Andini dkk., 2025; Anwar, 2017). Akibatnya, kurasi informasi yang diterima pengguna tidak lagi didasarkan pada urgensi nilai substantif, melainkan pada metrik viralitas dan kepuasan visual jangka pendek (Andini dkk., 2025; Anwar, 2017).





Dampak lanjutan dari fenomena tersebut adalah terjadinya distorsi pada skala prioritas; energi kognitif kelompok pemuda tersita untuk merespons tren populer yang bersifat superfisial demi mempertahankan validasi sosial di lingkungan virtual (Ahmad & Nurhidaya, 2020; Anwar, 2017). Pola ini secara sistematis membangun hambatan struktural yang menjauhkan mereka dari realitas tata kelola kenegaraan (Andini dkk., 2025). Pada saat perhatian kolektif terserap sepenuhnya oleh komodifikasi hiburan siber, ruang diskursus kritis mengenai produk regulasi formal menjadi teralienasi (Yanto & Sari, 2025). Kondisi ini melahirkan paradoks kesadaran: generasi muda memiliki konektivitas global yang tinggi melalui gawai, namun mengalami keterputusan informasi (*disconnection*) secara lokal terhadap kebijakan domestik yang secara langsung menentukan proyeksi masa depan mereka (Sugihartati, 2022).

Keterbatasan kapasitas kognitif generasi muda untuk menyeleksi dan memverifikasi substansi hukum di tengah gelombang banjir informasi (*overloading*) mengonfirmasi adanya krisis kognitif akut di ruang digital (Ahmad & Nurhidaya, 2020). Melimpahnya penetrasi internet ternyata tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan kecerdasan kewargaan, melainkan memicu devaluasi literasi kebijakan publik secara masif (*civic illiteracy*) (Heryanto, 2021). Kebiasaan mengonsumsi informasi yang telah mengalami simplifikasi ekstrem di media sosial mereduksi kemampuan analisis makro pemuda dalam membedah teks regulasi primer (Saud dkk., 2020). Akibatnya, mereka menjadi rentan terhadap paparan disinformasi serta berita bohong (*hoaks*) yang dikemas secara manipulatif (Ahmad & Nurhidaya, 2020; Anwar, 2017).

Secara aplikatif, kelumpuhan nalar kritis ini membawa konsekuensi sosio-ekonomi yang merugikan, khususnya pada sektor pendidikan tinggi dan lanskap ketenagakerjaan (Gamaputra dkk., 2025). Sikap apatis terhadap instrumen hukum dasar seperti skema kontrak kerja, hak keperdataan pekerja, dan standarisasi upah minimum menempatkan para lulusan muda (*fresh graduates*) pada posisi tawar yang lemah di pasar kerja (*labor market vulnerabilities*) (Andini dkk., 2025). Kelompok produktif ini mengalami kebutaan struktural terhadap hak-hak hukumnya, sehingga memiliki risiko tinggi terjebak dalam praktik eksploitasi industri (Andini dkk., 2025). Apabila krisis literasi ini diabaikan, keunggulan kuantitatif dalam postur bonus demografi tidak akan menjelma menjadi aset pembangunan, melainkan berbalik menjadi beban sosial akibat tingginya tingkat kerentanan sosio-ekonomi generasi muda (Ahmad & Nurhidaya, 2020).

Meluasnya fenomena slacktivism di kalangan pemuda memotret sebuah paradoks partisipasi yang nyata di dalam ekosistem siber (Andini dkk., 2025). Pada satu sisi, media sosial berhasil mendemokratisasi ruang publik dengan mempermudah mobilisasi opini kolektif melalui fitur ekspresi instan seperti *like*, kolom komentar, maupun aktivitas *resharing* (Saud dkk., 2020). Namun pada sisi lain, simplifikasi teknis ini mendegradasi mutu keterlibatan sipil menjadi sebatas manifestasi pseudo-kepedulian (Andini dkk., 2025). Aktivitas digital yang minimal usaha tersebut melahirkan bias interpretasi psikologis yang semu, di mana pemuda mengasumsikan bahwa tanggung jawab kewargaannya (*civic engagement*) telah ditunaikan secara tuntas hanya melalui interaksi layar gawai (Andini dkk., 2025).

"Ilusi kepedulian" ini mengaburkan realitas bahwa respons emosional jangka pendek berbasis tren digital sama sekali tidak menyentuh esensi materi dari dokumen kebijakan yang sedang dikritik atau didukung (Sari dkk., 2025). *Slacktivism* menjebak pemuda dalam zona kenyamanan digital yang dangkal, sehingga menggeser gerakan pemuda dari aksi kritis-substantif menjadi sekadar kosmetik digital (Andini dkk., 2025). Hal hasil, ekosistem media sosial saat ini lebih berfungsi sebagai katarsis emosional yang melumpuhkan gerakan intelektual struktural, ketimbang menjadi inkubator bagi lahirnya kesadaran hukum yang mendalam, kokoh, dan berkelanjutan dalam mengawal arah masa depan bangsa (Kadir, 2020).





KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kelekatatan gawai (*gadget attachment*) yang sangat intensif pada kelompok pemuda, dengan persentase kepemilikan telepon genggam mencapai angka riil 93% serta tingginya akses terhadap platform visual (TikTok, Instagram, YouTube) berperan signifikan dalam memperluas konektivitas siber, namun di sisi lain memicu krisis kognitif akut akibat paparan hoaks dan pengalihan fokus perhatian oleh algoritma platform ke arah tren hiburan yang superfisial. Kondisi ini melahirkan fenomena *slacktivism* atau "ilusi kepedulian", di mana respons emosional instan di media sosial mengaburkan fakta bahwa para pemuda mengalami pendangkalan pemahaman terhadap substansi hukum asli, sehingga menciptakan kebutaan struktural terhadap regulasi fundamental (seperti sektor pendidikan dan ketenagakerjaan) yang mengancam posisi tawar lulusan muda (*fresh graduates*) di pasar kerja. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan kreator konten untuk merekonstruksi model diseminasi informasi melalui komunikasi publik yang taktis, inklusif, dan interaktif guna membangun nalar kritis serta kesadaran hukum generasi muda demi mengamankan hak-hak strategis masa depan mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga seluruh rangkaian penyusunan artikel ilmiah yang berjudul "Peran Literasi Politik bagi Generasi Muda di Era Digital" ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan naskah kolaboratif lintas institusi ini dapat berjalan dengan lancar berkat adanya dukungan, bimbingan, serta sinergi dari berbagai pihak.

Secara khusus, rasa terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada Kak Mulawarman yang telah memberikan kepercayaan dan menawarkan kesempatan berharga ini kepada penulis untuk ikut serta menuangkan pemikiran dalam naskah ini. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada seluruh tim penulis, Kak Mulawarman, Kak Ratu Indra Kasih Pratiwi, Kak Nurul Sholeha, dan Kak Andris Riesfandhy atas kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi yang luar biasa selama proses analisis data sekunder dan studi kepustakaan ini berlangsung.

Tidak lupa, penulis menghaturkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah terkait yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan substantif, kritik konstruktif, serta bimbingan yang sangat berharga di sepanjang proses penyusunan naskah.

Semoga segala kontribusi, pemikiran, dan bantuan yang telah diberikan oleh seluruh pihak mendapatkan balasan kebaikan yang melimpah. Penulis menyadari bahwa naskah ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, segala bentuk masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca akan diterima dengan tangan terbuka demi penyempurnaan karya ilmiah di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityawan, J., Reyhan, I. E., & Christianto, A. (2025). Konstruksi Realitas Politik dalam Media Sosial: Studi Perilaku Pemilih di Era Informasi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1220-1227.
- Ahmad, A., & Nurhidaya, N. (2020). Media sosial dan tantangan masa depan generasi milenial. *Avant Garde*, 8(2), 134-148.
- Andini, S., Adhani, D. W., & Sartika, R. (2025). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK GENERASI MUDA: STUDI KASUS





- GENERASI MUDA KOTA BANDUNG DI ERA DIGITAL. *EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial*, 2(01), 39-43.
- Anwar, F. (2017). Perubahan dan permasalahan media sosial. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(1), 137-144.
- Andriyendi, D. O., Nurman, S., & Dewi, S. F. (2023). Media sosial dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 3(1), 101-111.
- Aulia, S. (2021). Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi milenial di era digital. *Komunikasi Anak Muda dan Perubahan Sosial*, 13.
- Gamaputra, G., Alrianingrum, S., & El Rizaq, A. D. B. (2025). Ekspansi Pendidikan Tinggi: Harapan, Tantangan, dan Peluang Transformasi Sosial. Penerbit: Kramantara JS.
- Hamran, H. S. (2025). Perilaku Slacktivisme Mahasiswa Universitas Hasanuddin dalam Merespon Isu Sosial di Lingkungan Kampus= Slacktivism Behavior of Hasanuddin University Students in Responding to Social Issues on Campus (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASSANUDDIN).
- Heryanto, G. G. (2021). Strategi literasi politik: Sebuah pendekatan teoritis dan praktis. *IRCiSoD*.
- Indrawan, J., Barzah, R. E., & Simanihুরু, H. (2023). Instagram sebagai media komunikasi politik bagi generasi milenial. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 170-179.
- Kadir, N. (2022). Media sosial dan politik partisipatif: Suatu kajian ruang publik, demokrasi bagi kaum milenial dan gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(2), 180-197.
- Kurniati, A., & Wahyuni, S. (2021). Hubungan Antara Intensitas Penggunaan Media Sosial dengan Penurunan Kemampuan Atensi pada Remaja. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 12(2), 140-152.
- Sari, Y., Suyato, S., Mulyono, B., & Murdiono, M. (2025). Generation Z Instagram Activism: Between Slacktivism And Online Civic Engagement In Indonesia's Democracy. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 7(2), 275-286.
- Saud, M., Ida, R., Abbas, A., Ashfaq, A., & Ahmad, A. R. (2020). Media sosial dan digitalisasi partisipasi politik pada generasi muda: perspektif indonesia. *Jurnal Society*, 8(1), 87-97.
- Sugihartati, R. (2022). Paradoks Perkembangan Masyarakat Informasi: Antara Literasi Dan Kesenjangan Digital.
- Yanto, S., & Sari, P. I. (2025). Analisis Dampak Media Sosial terhadap Literasi Politik dan Partisipasi Demokratis Generasi Z di Era Post-Truth: Analisis Dampak Media Sosial terhadap Literasi Politik dan Partisipasi Demokratis Generasi Z di Era Post-Truth. *Civic Education Perspective Journal*, 5(2), 67-76.

